

Judul : APBN 2016 Dirombak
 Tanggal : Jumat, 03 Juni 2016
 Surat Kabar : Media Indonesia
 Halaman : 17



RAPBN-P 2016 (Rp triliun)

	APBN 2016	RAPBN-P 2016	Selisih
■ Pendapatan negara	1.822,5	1.734,5	88
• Penerimaan perpajakan	1.546,7	1.527,1	19,6
• Penerimaan negara bukan pajak	273,8	205,4	68,4
■ Belanja negara	2.095,7	2.047,8	47,9
• Belanja pemerintah pusat	1.325,6	1.289,5	36
• Transfer ke daerah dan dana desa	770,2	758,3	11,9
■ % surplus/(defisit) terhadap PDB	(2,15)	(2,48)	0,33
■ Pembiayaan anggaran	273,2	313,3	40,2

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	APBN 2016	RAPBN-P 2016	Selisih
■ Inflasi (%)	4,7	4,0	0,7
■ Nilai tukar (Rp/US\$)	13.900	13.500	400
■ Harga minyak (US\$/barel)	50	35	15
■ Lifting Minyak (ribu barel/hari)	830	810	20

Sumber: Kemenkeu/Tim M/FOTO: ANT

APBN 2016 Dirombak

Untuk pertama kalinya transfer ke daerah lebih besar daripada belanja K/L.

NURIMAN JAYABUANA

PEMERINTAH mengajukan perubahan atas APBN 2016 kepada parlemen. Berbagai asumsi makro, target penerimaan, dan belanja direvisi turun. Sejumlah asumsi makro yang diturunkan, antara lain inflasi, nilai tukar, harga minyak Indonesia, dan target produksi (*lifting*) migas. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi dan suku bunga SBN tetap dipertahankan.

"Tentu saja ada dampak fiskal akibat dari perubahan asumsi dasar itu. Baik dari segi pendapatan maupun belanja," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, kemarin.

Pemerintah memangkas target penerimaan negara menjadi Rp1.734,5 triliun. Bambang mengungkapkan porsi penurunan terbesar ditujukan penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) yang dipangkas Rp68 triliun. "Di satu sisi kami lihat ada potensi *shortfall* besar di pajak, dan kami juga kurangi PNBP," kata dia. Adapun target penerimaan perpajakan diturunkan menjadi Rp1.527,1 triliun.

Di sisi lain, belanja pemerintah juga ikut mencuri menjadi Rp2.047,8 triliun. "Belanja diefisiensikan, tapi belanja ke daerah lebih besar. Untuk pertama kalinya transfer ke daerah lebih besar daripada belanja K/L (kementerian dan lembaga)," papar Bambang.

Estimasi penerimaan dan belanja yang lebih rendah tak terlepas dari perubahan asumsi untuk harga minyak (*Indonesia crude price/ICP*) dan *lifting* minyak. Berdasar kalkulasi pemerintah, akan ada dampak berupa penurunan pajak penghasilan (PPH) migas Rp17,1 triliun dan PNBP migas Rp50,2 triliun.

Meski belanja dan penerimaan sama-sama menyusut, defisit APBN diproyeksikan melebar menjadi 2,48% dari produk domestik bruto. Defisit akan dipenuhi dari peningkatan utang yang mencapai Rp40 triliun lebih. "Pembiayaan anggaran akan memanfaatkan sebagian dari sisa anggaran lebih,

dan termasuk menambah penerbitan SBN (surat berharga negara)."

Dalam rapat serupa, Deputy Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pertumbuhan ekonomi masih berpeluang mencapai ekspektasi awal, 5,3%. Sementara itu, pergerakan kurs rupiah selama 2016 ia perkirakan relatif stabil pada kisaran 13.500-13.800 per dolar AS.

Ketua Badan Anggaran DPR Kahar Muzakir mengungkapkan pihaknya akan mengagendakan pembentukan panitia untuk membahas RAPBN-P 2016, pekan depan.

Dipertanyakan

Di lain hal, Menteri Keuangan mempertanyakan kebijakan lembaga Standard & Poor's (S&P) Global Ratings yang kembali mempertahankan rating Indonesia di BB+/positive, satu level di bawah *investment grade*. Padahal, lembaga pemeringkat lain, Fitch dan Moody's, telah menyematkan *investment grade* bagi Indonesia.

Basis penilaian S&P itu, antara lain rasio utang Indonesia masih dianggap tinggi, akan mencapai 25% dari PDB di 2016, dan kinerja fiskal yang belum membaik. PDB per ka-

pita yang masih di kisaran US\$3.6 juga dinilai masih rendah.

"Alasan mereka rasio utang terhadap negara yang dapat *investment grade* itu banyak yang *debt to G ratio*-nya di atas kita. Defisitnya ja di atas kita. Makanya saya mempertanyakan S&P," ujar Bambang.

Dalam kesempatan terpisah, Menko Perekonomian Darmin Nustalio beranggapan S&P cenderung menunggu terobosan pemerintah. "Saya percaya mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Indonesia, termasuk bagaimana *tax amnesty* dan implikasinya."

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai *afirmasi rating dari S&P* tidak bermakna positif dalam kondisi perekonomian dewasa ini.

Sovereign country rating dari lembaga pemeringkat acap dianggap investor menggambarkan risiko investasi di negara tersebut baik lewat obligasi negara maupun pinjaman. Semakin tinggi rating yang dimiliki, biaya bunga yang perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah ke investor akan semakin rendah. (Arv/Dro/Ire/E-2)

nuriman@mediaindonesia.co